

# **PARTISIPASI MASYARAKAT KAMPUNG KUMUH DALAM UAPAYA PERBAIKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN<sup>1</sup>**

Sri Handayani<sup>2</sup>, Rubianto Ramelan<sup>3</sup>, Sukadi<sup>4</sup>, Maman Hilman<sup>5</sup>

## **ABSTRACT**

*Pendatang dan penduduk kota yang berpenghasilan rendah sebagian besar tinggal di permukiman kumuh yang beberapa di antaranya termasuk permukiman liar. Penggusuran tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, selain tidak manusiawi, para pemukim kembali menyerobot tempat lain sehingga hilang satu tumbuh yang baru.*

*Dikhawatirkan apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki maka kawasan-kawasan tersebut akan semakin memburuk kualitasnya. Dalam kaitan dengan hal tersebut perlu dicari model pemberdayaan yang efektif agar masyarakat permukiman kampung kota memahami kualitas lingkungan yang baik dan dapat mendukung terbentuknya kehidupan yang lebih berkualitas.*

*Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi: (1) karakteristik fisik lingkungan permukiman kumuh termasuk di dalamnya sarana prasarana yang tersedia, (2) karakteristik sosial ekonomi masyarakat (3) tingkat kebutuhan masyarakat akan rumah dan permukiman, (4) aspirasi masyarakat tentang rumah dan lingkungan permukiman (5) Menyusun strategi pemberdayaan agar masyarakat dapat ikut serta meningkatkan kualitas lingkungan.*

*Sampel area yang dijadikan lokasi penelitian adalah: RW 11 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal. Data dikumpulkan pada bulan April – Agustus 2007. Pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD), angket dan wawancara mendalam serta observasi. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk kemudian dikaji dengan data-data yang diperoleh secara kualitatif.*

*Hasil studi menunjukkan kondisi fisik rumah di permukiman kumuh mayoritas adalah buruk, demikian juga dengan lingkungan fisik permukiman. Modal sosial masyarakat di permukiman kumuh tergolong tinggi yang dicirikan dengan hubungan ketetanggaan yang sangat baik dan kegotongroyongan yang baik pula. Persepsi masyarakat tentang rumah dan lingkungan mayoritas buruk. Tingkat kebutuhan akan rumah sangat tinggi namun kemampuan memenuhinya tergolong rendah. Motivasi meningkatkan kualitas lingkungan mayoritas berada pada kategori tinggi. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman diprioritaskan dengan memperbaiki persepsi masyarakat tentang kualitas lingkungan sehingga akan meningkatkan motivasi meningkatkan kualitas lingkungan yang akan berpengaruh langsung pada partisipasi meningkatkan kualitas lingkungan.*

*Kata kunci: Permukiman kumuh, masyarakat, kualitas lingkungan.*

---

<sup>1</sup> Penelitian didanai Hibang Bersaing Dikti tahun 2007

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK UPI

<sup>3</sup> Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK UPI

<sup>4</sup> Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI

<sup>5</sup> Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK UPI

## Latar belakang penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini berawal dari kenyataan bahwa perkembangan permukiman kumuh semakin meluas seiring dengan tingginya urbanisasi dan pertumbuhan alami penduduk kota sendiri. Akibatnya kebutuhan akan rumah dan permukiman meningkat pula. Kebutuhan akan rumah dan sarana permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, sehingga kapasitas dan daya dukung sarana lingkungan permukiman yang ada selama ini semakin memburuk.

Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan diperlukan terobosan yang dapat memperbaiki kondisi permukiman kumuh ini menjadi permukiman yang layak huni dan menumbuhkan kualitas hidup dan lingkungan hidup yang lebih baik bagi para penghuninya.

Usaha untuk meningkatkan kualitas permukiman yang sehat dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk menggalang kerjasama warga permukiman kampung kumuh dengan pemerintah dan *stakeholders* dan bersama-sama menanggulangi menurunnya kualitas lingkungan yang terjadi pada permukiman kumuh selama ini.

Pemberdayaan dan Partisipasi terkait erat dengan pelaku yang terlibat didalamnya. Partisipasi merupakan bentuk hubungan yang saling menguntungkan bagi pelaku yakni pemerintah dan masyarakat. Dalam hubungan tersebut pemerintah perlu mengakui potensi masyarakat. Bila masyarakat aktif, pemerintah bertindak sebagai fasilitator sedangkan bila masyarakat tidak aktif, pemerintah mengupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi. Pihak pelaksana (profesional, swasta) perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan, alokasi sumberdaya dan pelaksanaan pembangunan.

Pemberdayaan dan Partisipasi berkaitan pula dengan prinsip belajar yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan orang luar (pemerintah atau lembaga kemasyarakatan). Dalam *mutual learning* terdapat pengakuan terhadap pengalaman dan pengetahuan antar pelaku. Perkembangan pengalaman dan pengetahuan masyarakat sering kurang sesuai dengan perubahan dan permasalahan yang dihadapi. Sebaliknya tidak jarang pula pengetahuan yang diperkenalkan oleh orang luar kurang mampu memecahkan permasalahan lokal. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat dan pihak lain saling melengkapi dan sama nilainya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Agar masyarakat dapat ikut berperan dalam perbaikan kampung harus ada kemampuan dan kemauan dari masyarakat. Kemampuan berpartisipasi berhubungan dengan kemampuan finansial, sumber daya manusia, organisasi dan kemampuan belajar. Sedangkan kemauan berpartisipasi berhubungan dengan motivasi untuk mengadakan perubahan dan menerima kegiatan yang diberikan. Kemampuan dan kemauan tersebut menjadi salah satu faktor penentu pada masyarakat bagi kerangka kerja partisipasi. Seseorang akan mau berpartisipasi dalam suatu kegiatan jika: (1) memperoleh manfaat atau kepuasan; motifnya kepuasan dari kegiatan yang akan dilakukan, dan (2) mengetahui dengan benar makna kegiatan: program, tujuan, langkah, dan proses.

Motivasi adalah pendorong seseorang untuk ikut mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini adalah partisipasi dalam proses peningkatan kualitas permukiman kampung kota. Pendorong itu bisa berupa kebutuhan dan kepentingan sendiri dan dapat pula berupa rasa tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Biasanya kepentingan merupakan pendorong utama keikutsertaan itu.

Berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam program perbaikan kampung, Surbakti (1984) mengemukakan bahwa Partisipasi seorang warga ditentukan oleh tiga unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi yaitu: 1) kesempatan yang memadai, 2) motivasi yang cukup dan 3) tersedianya sumber-sumber yang memadai pula.

Ketiga unsur tadi bersifat saling menunjang dan saling mengisi kekurangan unsur lain.. Idealnya seseorang harus memiliki ketiga unsur tersebut, tetapi dalam kenyataan tidak semua orang bisa memenuhi ketiga unsur tersebut. Namunn jika kesempatan berpartisipasi sangat terbuka dan banyak, maka motivasi yang cukup dan sumber-sumber yang cukup saja akan dapat menimbulkan partisipasi. Karena itu kesempatan yang sebesar-besarnya perlu disediakan bagi penghuni kampung kumuh untuk dapat berperan serta dalam perbaikan kampungnya

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model penanganan kawasan permukiman kumuh yang memperhatikan dan mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya, ekonomi, aspirasi dan potensi masyarakat setempat yang hasil akhirnya diharapkan dapat disusun panduan perancangan (*guidelines*) penanganan kawasan permukiman kumuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dalam tiga tahap: (1) Identifikasi Karakteristik Masyarakat Permukiman Kumuh dan Kondisi sarana prasarana dasar yang tersedia; (2) Analisis kebutuhan dan merumuskan Konsep Rancangan Model Penangan untuk peningkatan kualitas hidup dan lingkungan hidup; dan (3) Melakukan Uji validasi Model Penanganan Kawasan Permukiman kampung kumuh.

Konsep model penanganan kawasan permukiman kumuh yang dirumuskan meliputi dua model yaitu: (1) Model pemberdayaan masyarakat agar mereka tau, mau dan mampu ikut serta memperbaiki kondisi kampung yang dihuninya dan (2) Model desain kampung yang sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat kampung, baik potensi fisik lingkungan kampung maupun potensi sosial masyarakat kampung.

Tujuan penelitian di tahun pertama ini difokuskan untuk merumuskan konsep model pemberdayaan masyarakat yang mengakomodasi potensi masyarakat agar mereka siap untuk memperbaiki kondisi kampungnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini berbentuk *explanatory research* untuk mengidentifikasi dan menjelaskan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk dipergunakan sebagai modal untuk memperbaiki kampung kumuh.

Pengambilan data dilakukan pada bulan April – Agustus 2007 di RW 11 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Bandung. Penentuan sampel

dilakukan melalui dua tahapan yakni penentuan lokasi (sampel area) yang dilakukan secara purposif dan penentuan responden (sampel individu) dilakukan secara random dengan total responden sebanyak 80 responden yang ditentukan secara proporsional.

Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner tertutup disertai wawancara mendalam untuk responden terpilih. Data kualitatif dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan observasi.

Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif yang dilanjutkan dengan analisis korelasi untuk melihat hubungan antara variabel dengan menggunakan korelasi dari Pearson. Untuk interpretasi data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan triangulasi data dengan data-data yang didapatkan dari hasil FGD dan observasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan sekitar 70% kondisi fisik rumah pada permukiman kumuh di lokasi penelitian berada pada kategori buruk Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya karena kemampuan ekonomi yang terbatas juga terbatasnya lahan sehingga rumah-rumah seringkali mengabaikan aspek sirkulasi udara dan cahaya. Bukaannya jendela ke samping kiri-kanan rumah sudah tidak memungkinkan karena dinding-dinding rumah satu dengan rumah lainnya saling berhimpitan sementara bukaannya ke atas sulit dilakukan sehingga secara umum kondisi rumah cukup memprihatinkan.

Mayoritas hubungan ketetanggaaan di antara masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh yang dijadikan lokasi penelitian berada pada kategori baik yaitu sebanyak hampir 48% dan tidak satupun yang berada dalam kategori sangat buruk.

Sifat kegotongroyongan masyarakat di kampung kumuh sekitar 47% berada pada kategori baik. Hanya sekitar 8% berada pada kategori buruk. Dari kenyataan ini dapat dilihat bahwa potensi sosial untuk meningkatkan kualitas lingkungan sebenarnya sudah ada.

Keaktifan masyarakat untuk ikut dalam kelompok/organisasi kampung mayoritas berada pada kategori cukup yaitu sekitar 40%. Warga menganggap bahwa peran kelompok/organisasi masyarakat di kampungnya dinilai cukup mendukung (45%) terhadap perbaikan kualitas lingkungan kampung. Sementara sebesar 31% menganggap peran organisasi tidak mendukung terhadap perbaikan kualitas lingkungan.

Persepsi tentang standar rumah tinggal yang sehat mayoritas warga masyarakat memiliki persepsi yang buruk yaitu sekitar 60%. Demikian juga untuk persepsi tentang kualitas lingkungan mayoritas masyarakat yaitu sekitar 66,25% mempersepsi buruk. Namun demikian mayoritas masyarakat cukup puas tinggal di rumah dan lingkungan permukiman yang saat ini ditempati. Ini suatu ironi yang memprihatinkan dan memperlihatkan ketidakberdayaan masyarakat kampung kumuh. Meskipun merasa bahwa kualitas lingkungan permukimannya buruk namun karena untuk mendapatkan rumah dan permukiman yang lebih baik dan memenuhi standar di luar kemampuan mereka maka mereka cukup puas dengan menempati rumah di permukiman kampung kumuh yang cenderung kumuh dengan fasilitas minimal.

Tingkat kebutuhan akan rumah pada masyarakat di permukiman kampung kumuh mayoritas berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi yaitu sekitar 75%.

Namun tingkat kebutuhan akan rumah yang tinggi ini terhambat oleh kemampuan yang rendah (70%). Penyebab rendahnya kemampuan ini karena keterbatasan ekonomi. Mereka bekerja di sektor informal yang harus bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga hampir tidak tersisa waktu untuk memperbaiki rumah dan lingkungan permukimannya. Sementara tingkat kepuasan tinggal di rumah dan lingkungan permukiman yang ditempati saat ini mayoritas masyarakat mengatakan cukup yaitu sebesar 77%.

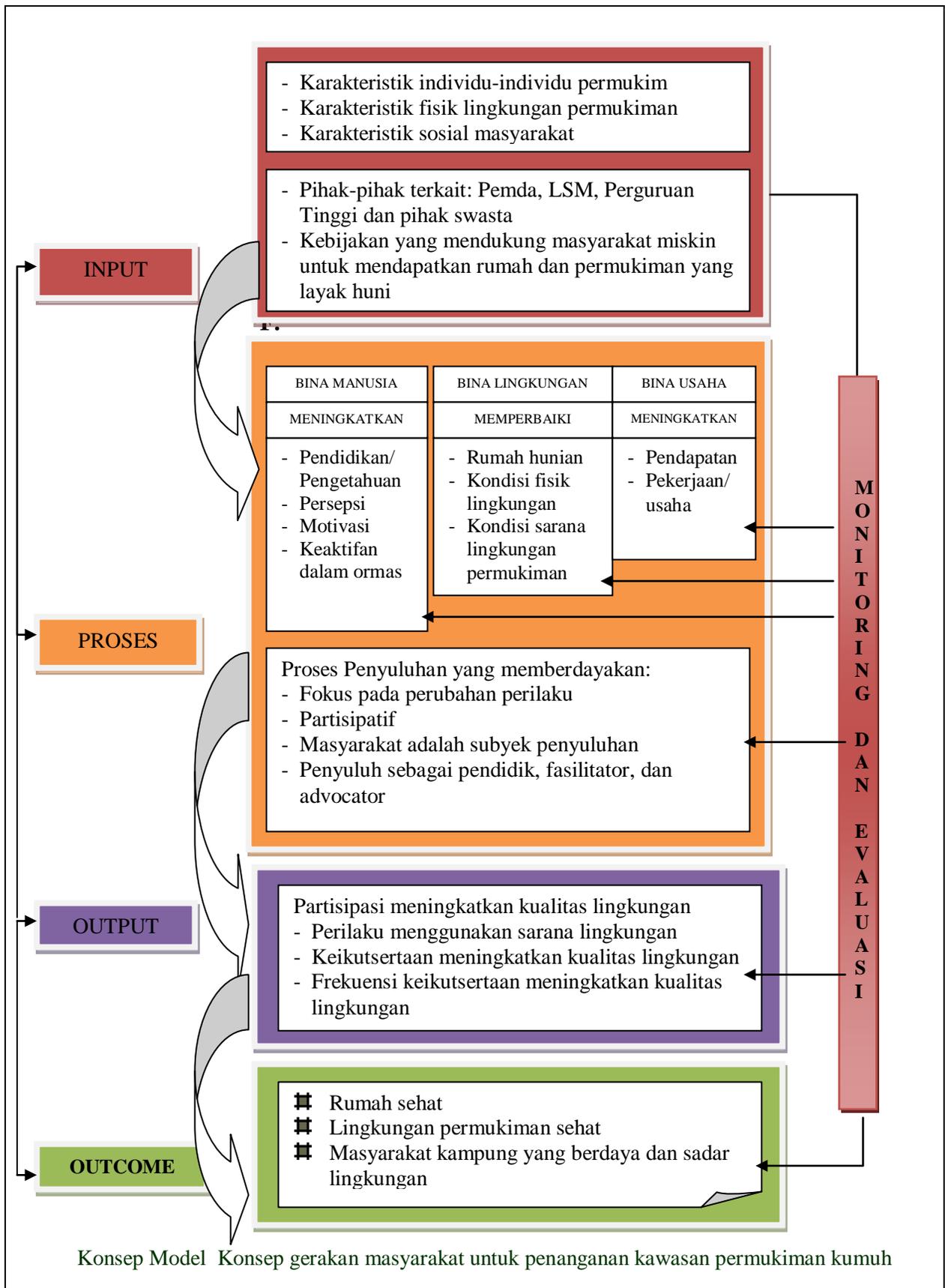
Motivasi bermukim di permukiman kampung kumuh sekitar 56% berada pada kategori tinggi. Demikian juga dengan motivasi meningkatkan kualitas rumah yang berada pada kategori tinggi yaitu sekitar 45%. Motivasi meningkatkan kualitas lingkungan pada masyarakat di kampung kumuh sekitar 41% berada pada kategori tinggi, dan hanya sekitar 15% yang motivasi meningkatkan kualitas lingkungannya pada kategori rendah.

### **Konsep Model Penanganan kampung kumuh berbasis potensi masyarakat**

Model Konsep Gerakan masyarakat ini selain didasarkan pada hasil penelitian di lapangan juga dilandasi hasil sintesa model intervensi komunitas Rothman (1974) yang merupakan gabungan antara pendekatan *development planning* dan *local development* dengan pertimbangan: (1) masih rendahnya intensitas kegiatan penyuluhan perumahan dan permukiman pada masyarakat di permukiman kumuh, (2) Masyarakat masih sangat membutuhkan kontribusi dari pihak luar, (3) masyarakat di permukiman kumuh sebetulnya memiliki potensi untuk berkontribusi secara aktif untuk turut serta bersama pemerintah dan pihak swasta melakukan peningkatan kualitas lingkungan permukimannya, namun masih banyak aspek yang belum kondusif sehingga model ini dilakukan secara terpadu dengan Dinas/Instansi terkait baik dalam hal perbaikan fisik kampung, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan kumuh tersebut. Gerakan masyarakat untuk penanganan permukiman kumuh ini mempunyai komponen program: (a) Pendampingan Perbaikan Fisik Lingkungan Sarana Prasarana Umum, (b). Penghijauan & Kebersihan Lingkungan, (c). Pembentukan Kelembagaan yayasan kampung, (d). Peningkatan SDM, (e). Operasional Kelembagaan, (f). Pemberian Kredit Lunak, (g). Perbaikan hunian

Berdasarkan lingkup kegiatan program yang ditangani maka perencanaan Gerakan masyarakat untuk penanganan kawasan permukiman kumuh ini mengadopsi pola **Tridaya**, yaitu : Daya Manusia (Pengembangan Sumber Daya Manusia), Daya Usaha (Pengembangan Usaha Kecil Menengah) dan Daya lingkungan (Peningkatan Kondisi Fisik Lingkungan)

Di bawah ini adalah Skema dari Model konsep gerakan masyarakat untuk penanganan kawasan permukiman kumuh.



## **Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

1. Karakteristik fisik lingkungan permukiman dicirikan dengan: Karakteristik fisik lingkungan permukiman yang buruk dan kondisi sarana prasarana yang saat ini tersedia juga dalam keadaan buruk. Namun demikian terdapat potensi fisik lingkungan yang dimiliki masyarakat yang saat ini belum dimaksimalkan yaitu unit pengolahan sampah yang dilakukan oleh warga setempat.
2. Karakteristik sosial masyarakat dicirikan dengan hubungan ketetanggaan berada pada kategori baik, kegotong royongan antar warga kampung berada pada kategori baik, peran tokoh masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan berada pada kategori cukup, keaktifan dalam ormas berada pada kategori cukup dan peran ormas untuk menggerakkan masyarakat meningkatkan kualitas lingkungan berada pada kategori cukup.
3. Kondisi fisik rumah hunian di permukiman kumuh mayoritas berkualitas buruk dengan ketersediaan ruang mayoritas hanya terdiri dari 2 – 3 ruang tiap rumah.
4. Mayoritas masyarakat di permukiman kumuh memiliki persepsi tentang kualitas lingkungan berada pada kategori buruk dan tidak sesuai dengan standar kualitas lingkungan sehat.
5. Tingkat kebutuhan akan rumah dan lingkungan pada masyarakat di permukiman kumuh mayoritas berada pada kategori tinggi namun kemampuan untuk mewujudkan kebutuhan akan rumah tersebut berada pada kategori rendah.
6. Motivasi meningkatkan kualitas lingkungan pada sebagian besar masyarakat di permukiman kumuh berada pada kategori tinggi.
7. Analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik fisik lingkungan, karakteristik rumah hunian, karakteristik sosial masyarakat, persepsi tentang kualitas lingkungan dan tingkat kebutuhan akan rumah dan lingkungan
8. Model pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang mayoritas berpenghasilan rendah dan bekerja pada sektor informal adalah berupa gerakan masyarakat dengan model Tri Bina yaitu Bina Masyarakat, Bina Lingkungan dan Bina Usaha yang dilakukan secara simultan dan sistematis dengan dukungan dari unsur penunjang seperti Pemerintah daerah, Organisasi non pemerintah (LSM, Perguruan Tinggi), Lembaga keuangan/perbankan atau sektor swasta.

### **Saran**

1. Persepsi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh permukiman kumuh tentang kualitas lingkungan perlu diperbaiki dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai rumah dan lingkungan yang sehat agar persepsi masyarakat tentang kualitas lingkungan mendekati nilai standar kualitas lingkungan yang telah dibakukan untuk sebuah permukiman yang layak huni.

2. Permukiman kumuh terkait erat dengan kemiskinan penghuninya. Untuk dapat memperbaikinya maka perlu dibuka akses-akses kepada masyarakat miskin tersebut agar mereka dapat memperbaiki tingkat kehidupan mereka.
3. Hubungan ketetangaan dan kegotongroyongan yang tumbuh dalam masyarakat di permukiman kumuh perlu dipelihara dan ditransformasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang diarahkan bukan saja untuk meningkatkan kualitas rumah dan lingkungan tapi juga untuk meningkatkan daya rekat kelompok, seperti kegiatan perbaikan lingkungan (bersih kampung, perbaikan selokan, perbaikan MCK umum, perkerasan jalan gang di kampung dan sebagainya).
4. Dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman, masyarakat perlu difasilitasi dengan pembentukan lembaga organisasi/koperasi di tingkat RW sehingga dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dan membuka peluang untuk mendapatkan akses bantuan dari Pemerintah/pihak luar untuk perbaikan kampung
5. Selain organisasi-organisasi masyarakat yang telah ada di kampung, perlu dikembangkan organisasi lintas kampung misalnya dalam bentuk lembaga kampung atau jaringan antara kampung dengan agenda pertemuan yang teratur (bulanan atau 3 bulanan) untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan aneka ragam permasalahan yang terjadi di kampung sehingga antar kampung dapat saling berbagi informasi, pengalaman, gagasan dan pemikiran untuk rencana atau pelaksanaan program-program pembangunan kampung.
6. Pada kawasan perkotaan yang rawan kumuh perlu mendapatkan perhatian yang lebih tegas dan terkoordinasi untuk mengantisipasi bertambah luasnya kawasan permukiman kumuh.
7. Kota Bandung seringkali terlilit masalah penanganan sampah, untuk menangani hal tersebut perlu dipikirkan untuk membentuk koperasi pengelolaan sampah kota. Di permukiman kampung tenaga kerja cukup melimpah dan dapat dipekerjakan dalam berbagai tahap pengelolaan mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pembuangan.
8. Dinas Tata Kota dan instransi terkait perlu menyusun pola pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal di perkampungan kumuh yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warganya dan memberikan akses kepada masyarakat selaku pelaku utama dalam membangun rumah dan permukimannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko & Hardjohubojo, Sudanti. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Penerbit Alumni. Bandung
- Boedoyo, Poedio, dkk. 1986. *Arsitektur, Manusia, dan Pengamatannya*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Haryadi. Setiawan. B 1996. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku Suatu Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi*. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Utama. Bandung.
- Khudori, Darwis. 2002. *Menuju Kampung Pemerdakaan. Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*. Yayasan Pondok Rakyat. Yogyakarta.

- Rapoport, Amos. 1982. *The Meaning of the Built Environment*. Beverly Hills, California: Sage Publications.
- Roesmidi & Risyanti, Riza. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Al Qaprint. Jatinangor
- Santoso, Jo., dkk. 2002. *Sistem Perumahan Sosial di Indonesia*. Center for Urban Studies dan IAP. Jakarta
- Sarwono, Wirawan Sarlito. 1994. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta. Gramedia.
- Sastra, M. Suparno & Marlina Endy. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan. Sebuah Konsep, Pedoman dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Penerbit Andi . Jogjakarta
- Slamet, Margono. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB. Press. Bogor.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Wiryomartono., A. Bagoes P. 1995. *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

### **Jurnal, Majalah, Laporan, Penelitian Dan Penerbitan Terbatas**

- Karamoy, Amir. *Program Perbaikan Kampung: Harapan dan Kenyataan*. PRISMA, LP3ES. Jakarta, No. 6 1984
- Supandhy, Aca. *Penataan Ruang Wilayah, Daerah dan Kota*. PRISMA, LP3ES. Jakarta, No. 6 1984
- Surbakti, A. Ramlan. *Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung*. PRISMA, LP3ES. Jakarta, No. 6 1984
- Poerbo, Hasan. *Memadukan Rencana Pemerintah Dengan Rencana Masyarakat*. PRISMA, LP3ES. Jakarta, Januari 1987
- Astuti, Sri. 2004. *Menumbuhkan Perekonomian Desa sebagai Solusi Meningkatkan Kualitas Perumahan Kota*. Jurnal Permukiman Vol. 20. No. 1.
- Sunarti. 2001. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok*. Tesis Bidang Khusus Manajemen Perkotaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung. (tidak dipublikasikan)

Lokasi dan Potensi fisik kampung  
RW 11 Kelurahan Cibangkong Kec. Batununggal Bandung

**Radio Suara Cibangkong**

**PENGUMI SEEN**

**BALAI PERTEMUAN RW.05**  
KOTA BANDUNG

**Ruang terbuka untuk bermain/ber OR**

**Unit pengelolaan sampah kampung**

**Sungai anak cikapundung kolot**

